

A. Pendahuluan

Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa sejak berdirinya sampai sekarang, Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) tergolong organisasi terbesar di Indonesia. Bahkan, sebagian pengamat mengklaim keduanya merupakan organisasi kaum Muslim terbesar di seluruh dunia. Lebih dari itu, keduanya sekaligus menjadi organisasi tertua, yang eksistensinya tidak pernah terputus sejak dilahirkan (Azyumardi Azra, 1999: 146). Tentu saja dinamika pun mewarnai perjalanan kedua organisasi ini, sehingga wajar apabila kajian terhadap kedua organisasi ini tidak pernah ada habisnya.

Selanjutnya, perlu ditegaskan bahwa sejak kelahirannya, banyak para ahli menggolongkan NU sebagai organisasi tradisional sedangkan Muhammadiyah sebagai organisasi modern. Hal ini didasarkan,

sebagaimana diungkapkan Deliar Noer, bahwa ketradisionalan NU disebabkan organisasi ini lebih banyak menghiraukan soal-soal agama, *din* atau ibadah belaka. Bagi NU Islam seakan sama dengan fiqh, dan dalam hubungan ini mereka mengakui taklid dan menolak ijtihad. Tak ketinggalan, banyak praktek ritual yang dilakukan NU dicampuradukan dengan budaya-budaya yang sudah ada. Sebaliknya, Muhammadiyah sering disebut sebagai golongan pembaharu dikarenakan lebih memberi perhatian pada sifat Islam pada umumnya. Bagi Muhammadiyah Islam adalah sesuai dengan tuntutan dan keadaan zaman. Islam juga berarti kemajuan, agama itu tidak akan menghambat usaha mencari ilmu pengetahuan, perkembangan sains, dan kedudukan wanita. Kalangan ini juga terkenal dengan gerakan puritan (pembersihan dari praktek-praktek

ritual yang tidak ada dasarnya) (Deliar Noer, 1995: 320 – 322).

Anggapan di atas mungkin dapat dibenarkan untuk konteks NU sebelum tahun 1980-an. Namun, jika mencermati dinamika yang ada, khususnya dewasa ini, tampaknya perlu mengkaji ulang dengan mempertanyakan kembali masih relevankah dikotomi modernis dan tradisional apabila dirujuk pada organisasi besar kaum muslimin, NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana dapat dilihat, bahwa sebagian pengamat mulai menggugat polarisasi istilah modernis dan tradisional atau modern dan tradisional bila digunakan untuk mengamati perkembangan pemikiran NU dewasa ini, dan sebaliknya bahkan mempertanyakan kemoderenan Muhammadiyah. Terutama, sejak kembali ke Khittah 1926, di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, NU bergerak melakukan perubahan-

perubahan, baik dari segi visi, orientasi, maupun strategi (Mujamil Qomar, 2002: 27).

Melihat fenomena tersebut, kajian ini mencoba menengok kembali dinamika sejarah kedua organisasi tersebut, terutama menyoroti tentang perjalanan dan perubahan di tubuh NU. Terkait dengan perjalanan NU dewasa ini, tampaknya perlu mempertanyakan kembali betulkah NU telah mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal pemikiran Islam, sehingga kurang tepat apabila label tradisional disandangnya. Demikian pula, apakah betul bahwa sesuatu yang tetap melestarikan tradisi adalah kolot dan anti kemodernan, dan sebaliknya, bagaimana dengan kemodernan Muhammadiyah itu sendiri.

B. Muhammadiyah Mordenis, NU

Tradisionalis

Secara keorganisasian Muhammadiyah lebih dulu lahir di banding dengan NU. Dalam sejarah tercatat bahwa Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta dengan pendiri K.H. Ahmad Dahlan. Tujuan organisasi ini adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw. kepada penduduk bumiputra dan memajukan agama Islam terhadap para anggota-anggotanya. Agar tujuan tersebut tercapai, organisasi itu bermaksud mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat tabligh yang akan membicarakan permasalahan Islam, mendirikan wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, surat-surat kabar, dan majalah-majalah (Deliar Noer, 86). Atas dasar itulah, Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi

pembaharuan (reformis) atau dalam penggolongan sosial sering disebut dengan kata-kata *wong* Muhammadiyah, orang modern (Nur Syam, 2005: 256).

Beberapa wilayah pembaharuan yang ditempuh organisai ini, misalnya, dalam bidang keagamaan adalah menekankan pada usaha-usaha untuk mengembalikan kemurnian Islam dari pengaruh-pengaruh yang salah dengan mendasarkan pada al-Quran dan Hadits. Dalam konteks ini, biasanya pemurnian diarahkan kepada praktek ajaran Islam yang telah tercampur dengan tradisi-tradisi lokal, karena praktek Islam semacam ini dipandang dekat dengan *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* yang tentu saja, menurut organisasi ini, menyimpang dari genuinitas Islam. Dalam hal ini, Amin Rais pernah mengatakan bahwa

“tauhid menuntut pemurnian atau purifikasi keyakinan setiap orang beriman dengan jalan menjauhkan diri dari setiap gejala TBK

(*takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*), karena setiap gejala TBK berarti elah menjauhkan martabat manusia ke lembah yang paling nista. Tidak mengherankan bila Muhammadiyah kemudian mempunyai kepekaan tajam terhadap hal-hal yang dikategorikan TBK (Amin Rais, 1996: 4).

Oleh karena itu, Muhammadiyah dengan gigih mempertahankan pendapat bahwa pintu *ijtihad* masih tetap terbuka dan menolak ide tentang *taklid*.

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, usaha yang dirintis Muhammadiyah adalah mendirikan rumah sakit poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga-lembaga dan bukan secara individual sebagaimana yang dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara anak yatim piatu. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, pembaharuan yang dimaksud adalah mengadakan perubahan-perubahan dengan menciptakan bentuk-bentuk baru yang berwujud nilai batin dan cara atau

teknik baru dalam lingkungan pendidikan dan pengajaran yang tetap memenuhi tuntutan masa dengan dasar pada pedoman yang tetap dari prinsip-prinsip ajaran Islam (A. Jainuri, 1990: 51 – 65).

Karena dalam konteks pembaharuan pemikiran agama, Muhammadiyah senantiasa menyatakan dan melekatkan dimensi ajaran “kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunah dengan dimensi “*ijtihad*” dan “*tajdid*” sosial keagamaan, maka anggota perserikatan ini umumnya tidak bermazhab tertentu, hal ini merupakan cermin mekanisme kerja *ijtihad* yang kritis terhadap segala bentuk historisitas kelembagaan agama dan kelembagaan pemahaman fiqih. Lewat *ijtihad* dan *tajdid* kebudayaan, Muhammadiyah dengan sengaja meniru dan melaksanakan sistem pendidikan “sekolah”, untuk tidak menyebutnya dengan sistem pendidikan Barat, yang

mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan secara lebih utuh dan komprehensif, baik dalam wilayah natural maupun *behavioral sciences*, tanpa meninggalkan ilmu-ilmu agama (Amin Abdullah, 1995: 109 – 111).

Berbeda dengan Muhammadiyah, sejak kelahirannya NU terkenal dengan kelompok yang disebut “kalangan tradisionalis”. Hal ini tidak terlepas dari munculnya organisasi ini memang dalam rangka mempertahankan praktek-praktek keagamaan yang banyak menjunjung tradisi. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, bahwa ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap *bid'ah*, maka gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum yang terkenal

modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah Pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII dibawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Namun, sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, yang kemudian menjelma dalam organisasi NU, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut (Sejarah NU, INTERNET\NU online.htm).

Dalam Anggaran Dasar NU tahun 1927 juga dirumuskan, bahwa organisasi ini bertujuan untuk memperkuat kesatuan kaum muslimin kepada salah satu dari mazhab empat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: *satu*, memperkuat persatuan antara sesama ulama yang masih setia pada ajaran-ajaran mazhab; *dua*, memberikan bimbingan tentang jenis-

jenis buku (*kitab*) yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam; *tiga*, menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali); *empat*, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya; dan *lima*, membantu pembangunan masjid-masjid, langgar, dan pondok pesantren (Dhofier, 1994: 97 – 98).

Mengacu hal tersebut, tidaklah aneh apabila para Indonesianis (sebutan akrab bagi peneliti mancanegara), termasuk juga kalangan yang menyebut dirinya modernis, menyebut NU sebagai kalangan tradisionalis. Tradisional dalam arti yang vital adalah kehidupan keagamaan, yaitu transmisi nilai-nilai keagamaan melalui tradisi keagamaan dan pendidikan. Sementara itu, tradisional dalam pengertian kata yang sebenarnya, yakni melekatkan transmisi dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Oleh karena itu, penyandangan "tradisionalis" bukanlah tanpa alasan. Memang NU besar dan dibesarkan dalam tradisi (*al-turats*). Tradisi yang tergambar dalam keilmuan klasik (*kitab kuning*) dan praktik-praktik keagamaan yang berbau lokalitas, telah menjadi bagian terpenting dalam pandangan hidup kalangan kaum nahdliyin secara umum. Mereka berasal dari tradisi, oleh tradisi, dan untuk tradisi. Begitulah, kalangan nahdliyin menancapkan identitasnya dalam lingkaran tradisi. Tradisi adalah harta karun yang harus diapresiasi sebaik mungkin untuk mempertahankan identitas dan membaca tanda-tanda zaman. Sementara itu, pesantren menjadi saksi sejarah kenyataan tersebut. Pesantren menjadi institusi pendidikan keagamaan yang sangat baik untuk melestarikan tradisi sekaligus mengembangkannya. (Kompas Minggu, 28 November 2004).

Dalam hal ini perlu ditekankan, bahwa perbedaan pemahaman keagamaanlah yang pada dasarnya telah mulai melibatkan kedua kelompok tersebut (Muhammadiyah dan NU) dalam perdebatan yang bukan hanya sebentar, akan tetapi dapat dikatakan sangat melelahkan dan memprihatinkan. Namun, sebenarnya perbedaan yang terjadi antara mereka lebih pada persoalan-persoalan metodologis dalam mendekati ajaran Islam daripada persoalan lainnya. Bahkan belum pernah terjadi pertentangan di antara keduanya dalam masalah yang prinsip. Oleh karena itu, jika dikotomi tradisionalis-modernis dihubungkan dengan cara berpikir dan memahami agama, maka suatu organisasi keagamaan disebut modernis karena cara memahami ajaran agama dengan mengutamakan nalar sehingga mampu mengikuti perubahan-perubahan. Sementara itu, suatu

organisasi keagamaan disebut tradisional, karena dalam memahami ajaran agama adalah dengan mempertimbangkan tradisi di kalangan masyarakat Islam, sehingga kurang mampu mengikuti perubahan-perubahan. (Mujamil Qomar, 2002: 26). Sekarang, bagaimana dengan NU sendiri, apakah dalam tubuh organisasi ini ada gejala dalam cara memahami ajaran agama dengan mengutamakan nalar yang mampu mengikuti perubahan-perubahan, sehingga label modernis patut disandanginya?

A. Menyoal Kembali Dikotomi Tradisional-Modern

Sebagai kerangka berpikir, sebelumnya mungkin perlu dipertegas terlebih dahulu arti kata modern. Modern, sebagaimana terdapat dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak yang sesuai dengan tuntutan

zaman (Depdikbud, 1997: 662). Modern dapat juga diartikan dengan kata dinamis, yang mempunyai arti di samping energik dan totalitas juga kemampuan untuk beradaptasi dan merespon secara kreatif lingkungan yang sulit. Ditegaskan, bahwa dinamisasi pada dasarnya mencakup dua proses, yaitu penggalakkan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada, di samping mencakup pula pergantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Sementara itu, proses pergantian nilai tersebut dapat dinamakan dengan modernisasi (Greg Barton, 1997: 176).

Diungkapkan pula, bahwa salah satu ciri manusia modern adalah terbuka pada pengalaman-pengalaman yang baru dan tidak mencurigai pendapat baru atau pikiran-pikiran baru. Dia selalu terbuka dan terangsang untuk mengetahui hal-hal yang baru. Sebaliknya, manusia tradisional bersifat

tertutup dari gagasan-gagasan baru, tidak toleran terhadap pendapat baru, bergantung sekali pada otoritas, dan percaya pada takhayul (Jalaluddin Rakhmat, 2005: 122-123).

Dari pengertian modern tersebut dapatkah, dalam perjalanan sekarang ini, NU menyandang gelar modern sebagaimana Muhammadiyah? Tentu saja, jika memandang NU dari mulai berdirinya (tahun 1926) hingga kira-kira tahun 1970-an, yaitu organisasi yang didirikan dan diperkuat oleh ulama yang pada umumnya berpandangan konservatif, berpendidikan pesantren, dan toleran dengan tradisi keagamaan lokal asalkan, menurut mereka, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pandangan bahwa NU berpemahaman dan berpemikiran tradisional secara umum bisa mendapat pembenaran. Ditambah lagi, pada kurun itu memang dalam praktek keagamaan

masih kental dengan *taklid* khususnya hanya terhadap pendapat Imam Syafi'i, walaupun dalam teorinya NU mengakui empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pandangan semacam itu kurang tepat apabila dialamatkan kepada NU setelah memasuki tahun 1989-an, karena pada tahun-tahun ini dalam tubuh organisasi ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat, bahwa berbarengan dengan depolitisasi, maka tumbuh kembali minat baru dalam pengembangan bidang pendidikan dan tradisi intelektualisme Islam. Pada awalnya gairah intelektualitas NU memang terkesan datar, namun hingga tahun 1980-an tampak gairah yang meluap-luap seiring dengan kehadiran figur Abdurrahman Wahid dan Ahmad Shidiq.

Jadi, setidaknya sampai dengan Muktamar ke-26 di Semarang, tahun

1979, dapat dibenarkan apabila banyak kalangan yang masih melihat NU sebagai organisasi ulama dengan pengikutnya di pedesaan yang secara agama adalah tradisional, secara intelektual sederhana, secara politis oportunistik, dan secara kultural sinkritik. Akan tetapi, lima tahun kemudian, setelah Muktamar Situbondo 1984 yang menghasilkan keputusan kembalinya NU ke Kittah 1926, NU ternyata mampu menyerap nilai-nilai modern. Penyerapan nilai-nilai modern ini didasari dalam kerangka tradisi ilmu keagamaan dan adaptasi modern dengan struktur politik dewasa itu (Arief Mudatsir, 1984: 131-132).

Kembali ke Kittah 1926, berarti NU harus kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan tidak lagi berhubungan dengan politik. Kondisi inilah yang menjadikan, terutama generasi muda NU, tidak lagi sibuk dengan kegiatan politik, tetapi beralih

kepada kajian-kajian ilmiah, penelitian, seminar, dan aksi sosial. Oleh karena itu, sejak generasi muda NU berminat terhadap kajian, berkembanglah pembaharuan wacana di kalangan NU dengan berbagai gagasan pemikiran, melalui tulisan-tulisan dan jurnal, majalah, surat kabar, dan internet (Shonhaji, 2004: 37). Tampaknya, ungkapan Nurcholish Majid juga perlu untuk disimak, bahwa

“orang-orang muda NU yang akhir-akhir ini saya dengar dan saya lihat, banyak menelurkan karya-karya tulis, baik di media maupun dalam betuk buku. Fenomena ini tentu saja patut disyukuri, karena selama ini NU dikenal sebagai kelompok kolot, tradisional dan anti kemodernan. Maksudnya, geliat pemikiran yang terjadi di tengah-tengah orang-orang muda NU ini membuktikan bahwa tradisi tidak selamanya buruk dan anti kemodernan (Nurcholish Majid, 2004: x)”.

Memang, dengan kembalinya ke Kittah 1926 dalam muktamar Situbondo 1984 dan tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai ketua *Tanfidziah* (eksekutif) serta Ahmad

Shiddiq sebagai ketua *Syuriah* (legislatif) dapat diartikan suatu bagian penting dari kampanye pembaharuan dalam NU. Hal ini menandai dimulainya era baru bagi NU, yakni adanya proses perubahan dan pembaruan. Di sisi lain, hal ini juga merupakan pengalaman unik, karena bersamaan pada saat Iran memberikan contoh yang cukup menarik bagi minat sebagian masyarakat Indonesia tentang pembentukan negara Islam dan ketika terjemahan karya-karya Sayid Qutab, Maududi, Ali Syari’ati dan lainnya yang diidentikkan dengan radikalisme dibaca banyak orang, tetapi secara paradoks sebuah organisasi Islam tradisional di Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang terbuka yang menolak sebuah bentuk fanatisme keagamaan dan berupaya melakukan penyesuaian keagamaan dengan modernitas (Shonhaji, 2004: 42).

Demikian pula, penting untuk dicatat bahwa pada muktamar NU ke-27 1984 ditandai dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan organisasi politik dan kemasyarakatan. Pandangan ini didasarkan karena Pancasila bagi umat Islam Indonesia adalah wajib hukumnya. Dalam hal ini, NU menganut pendirian bahwa Islam adalah agama yang *fitriah* (sifat asal atau murni), sehingga sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan dan dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. Dengan demikian, ketika Islam diterima oleh masyarakat, ia tidak harus mengganti nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi ia akan bersikap menyempurnakan segala kebaikan yang dimiliki masyarakat. Berangkat dari konsep *fitriah*, membuat NU bersifat

inklusif, mengakui nilai-nilai yang baik yang sudah ada di dalam masyarakat untuk mengembangkan Islam (Martin van Bruinessen, 1997: 89).

Setelah tahun 1980-an, NU memang tampak progresi, baik dalam hal pemikiran keagamaan, sosial, politik, maupun kultur. Beberapa pemikir dan peneliti telah menilai bahwa NU ternyata tidak selamanya statis, sebagaimana digambarkan oleh kalangan modernis. Tradisional yang dibawa NU tidak sebagaimana yang digambarkan, yaitu kolot atau anti pada orang luar. NU memang sebagai kelompok tradisional, namun kurang tepat untuk era sekarang ini memberi penilaian bahwa NU adalah golongan konservatif, kolot, dan tidak mampu menghadapi perkembangan zaman. Justru dengan sifatnya yang tradisional itu (*ahl al-sunnah wa al-jamaah*), NU membuktikan bahwa dirinya memiliki banyak rujukan untuk menghadapi

berbagai perkembangan dan tantangan.

Sebagaimana diungkapkan, bahwa

NU yang selama ini dianggap sebagai organisasi tradisional dengan basis pesantren justru memperlihatkan gairah progresivitas berpikir, dibandingkan dengan organisasi modern yang malah tampak stagnan dan resisten. Kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad lalu dan dijadikan salah satu referensi utama nahdhiyyin ternyata justru membuka wawasan yang membentang luas dalam mencermati perubahan sosial. Pemahaman agama bergerak tidak lagi secara tekstualis, tetapi kontekstual. Tentunya ini perlu dipandang sebagai kemajuan di dalam NU. Kemajuan peradaban selalu lahir dalam suasana kebebasan pikir (Said Aqil Siradj, *Kompas*: 2003).

Di samping itu, NU mempunyai dasar dan kekayaan intelektual luar biasa yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut melalui lembaga pesantren. Inilah modal kultural intelektual NU untuk berdialektika dengan modernitas. (Said Aqil Siradj, *Kompas*: 2003)

Suatu hal yang penting, bahwa tradisionalisme NU dalam bidang

keagamaan dan pendidikan tidaklah

berarti bahwa muatan yang dipelajari

dan di transmisikan juga bersifat

tradisional, dalam arti repetis buta

terhadap hal-hal yang berbau masa lalu.

Bagaimanapun, apa yang dipelajari dan

ditransmisikan adalah suatu sistem

ideal di mana individu-individu dapat

menyesuaikan diri mereka dan mampu

menghadapi realitas sosial. Bentuk

transmisi bisa jadi tradisional, tetapi

apa yang ditransmisikan bisa radikal.

Inilah salah satu alasan mengapa

tradisionalisme NU tidak menghalangi,

melainkan justru meningkatkan

radikalisme organisasinya dan

menggalakan sikap radikal politiknya

dalam merespon situasi-situasi tertentu

(Mitsuo Nakamura, 1997 : 73).

Dalam catatan Azra

diungkapkan, NU dikenal sebagai

organisasi “tradisionalis”, bahkan

kelahirannya merupakan reaksi atas

perkembangan Muhammadiyah yang

sering dikategorisasikan sebagai organisasi Muslim “modernis.” Tradisionalisme ini terletak pada kenyataan bahwa ia pada hakekatnya bertujuan untuk meneruskan dan memelihara tradisi “Aswaja” (*ahl al-sunnah wa al-jamaah*) dalam lingkup keempat mazhab fiqih Sunni dan aliran teologi (kalam) Asy’ari. Namun, kerangka tradisi aswaja ini menjadikan NU cenderung dapat bersikap inklusif (merangkul dan menyerap keragaman di dalam Sunni itu sendiri) ketimbang bersikap eksklusif, yakni menyisakan diri dalam salah satu aliran Sunni (Azyumardi Azra, 2002: 141). Hal ini dengan apa yang pernah disimpulkan oleh Greg Barton bahwa

"tradisionalisme Islam di Indonesia sangat memberi harapan untuk melahirkan generasi neo-modernis yang berwawasan pluralis, inklusif, dan liberal. Yaitu, pemikir-pemikir yang menekankan ijtihad kontekstual, komitmen mengombinasikan pendidikan Barat dan tradisi kesarjanaan Islam klasik, kejujuran yang terbuka, dan penolakan terhadap dogmatis demi apresiasi pada pluralisme yang lahir

dari keyakinan bahwa harus ada pemisahan antara agama dan negara demi tegaknya nilai-nilai demokrasi" (<http://www.pesantrenonline.com>)

Greg Barton juga mengungkapkan, dengan sifat inklusifnya, NU sangat menghargai warisan dan tradisi ulama, baik yang ditransmisikan secara lisan dan praktikal maupun secara tertulis melalui kitab kuning (*turath*). Konsekwensinya, NU memiliki kekayaan warisan keagamaan yang luar biasa, yang tersimpan dalam sekian banyak kitab kuning, yang tentu saja memberinya ruang gerak lebih luas dalam merespon berbagai perkembangan, bukan hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga bidang sosial, politik, kultural, dan lain-lain (<http://www.pesantrenonline.com>).

Setelah munculnya Abdurrahman Wahid memimpin NU, terlepas dari kontroversi tentang kepribadiannya, NU terkesan lebih responsif dan “modernis”, atau bahkan

“lebih radikal” ketimbang Muhammadiyah. Ulama-ulama NU secara teratur mengadakan *bahts al-masa’il* untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan perkembangan baru, dan tidak jarang keputusan-keputusan yang mereka hasilkan dalam segi-segi tertentu sangat modernis. Misalnya, soal bunga bank dan kerja sama bisnis dengan pengusaha non-Muslim. Juhur ulama NU sepakat menunda atau mengesampingkan bunga bank, untuk kemudian mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma (NU dan Summa Group, sebuah konglomerasi non-Muslim) (Azyumardi Azra, 2002: 143).

Jika pada masa awal, kalangan nahdiyyin yang terkenal dengan penganut pandangan-pandangan fiqih empat mazhab (mazhab fiqih *ahl al-sunnah wa al-jamaah*), yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, walaupun

secara faktual mengalami reduksi dan hanya dibatasi pada pandangan-pandangan fiqih mazhab Syafi’i, yang kemudian mengacu dan berpegang kepada kitab (kitab-kitab yang tidak bertentangan dengan akidah *ahl al-sunnah wa al-jamaah*), namun pada era sekarang terutama setelah muncul generasi baru, NU tampak progresif dan tampak meninggalkan ketradisionalannya. Mereka melihat dengan jernih keterasingan pikiran-pikiran tradisional pesantren dari proses modernitas yang terus tumbuh dan berkembang dalam gelombang yang sangat dahsyat. Kitab-kitab *mu’tabar* yang selama ini didoktrinkan sebagai rujukan yang mampu menjawab segala-galanya bagi problem kehidupan masyarakat ternyata tidak terbukti, sehingga disadari atau tidak, para ulama NU telah menggugat sendiri tradisinya (Husein Muhammad, 2004: 78-80).

Dalam hal ini adalah penting untuk mencermati terkait pengambilan keputusan *bahtsul masa'il* yang dihasilkan oleh Munas NU di Lampung pada tahun 1992. Dalam sistem pengambilan keputusan *bahtsul masa'il* tersebut, kajian dan pembacaan atas teks tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan jawaban literal, harfiah, qauli, melainkan juga membaca secara kritis atas aspek yang dikaji dengan menggunakan analisis sosial budaya. Munas ini menyebutnya sebagai analisis kontekstual dan melalui pendekatan *manhaji* (metodologi) (Husein Muhammad, 83). Hal tersebut menandakan adanya redefinisi arti bermazhab. Artinya, di kalangan NU dewasa ini ada pemikiran yang dapat dikatakan progresif bahwa mengartikan bermazhab itu bukan lantas mengambil pendapat imam mazhab dari kata perkata (*fi al-aqwal*), akan tetapi metodologinya (*fi al-manhaj*) yang

diambil, bahkan mengembangkan metodologi yang sudah digunakan para imam mazhab bukan lagi mengikuti metodologinya (A. Qodri Azizy, 2003: 24-25). Misalnya, Said Agil Siradj mengungkapkan bahwa ketika taklid kepada Imam Syafi'i, maka yang diikuti adalah *manhaj*-nya. Artinya, dalam bertaklid agar melakukan taklid kritis atau melakukan kritik pemahaman yang tidak relevan. Jadi, pada dasarnya tetap sebagai pengukut Syafi'i, namun mengkritisnya (Mujamil Qomar, 2002: 193).

Kemudian, dapat dilihat pula bahwa NU semakin tampak memperlihatkan perkembangan dalam pemikiran setelah kemunculan kaum Nahdiyin baru pasca Abdurrahman Wahid. Sejak kemunculannya, generasi muda NU berminat terhadap kajian yang terus tumbuh dan berkembang. Kemudian mereka melakukan pembaharuan wacana dengan berbagai

gagasan dan pemikiran melalui tulisan-tulisan dalam jurnal, majalah, surat kabar, dan internet. Oleh karena itu, untuk melaksanakan program-program dan mempublikasikannya, mereka mendirikan lembaga-lembaga kajian, seperti Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD) di Surabaya, Lembaga Kajian Islam dan Sosial di Yogyakarta, dan Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) di Jakarta (Shonhaji Sholeh, 2004: 37).

Terkait dengan kalangan muda NU, perlu juga menengok ungkapan Jalaluddin Rakhmat, bahwa

“yang menarik belakangan ini justru orang-orang NU. Dengan bagus, mereka mempertahankan *inquisitive mind*-nya (rasa ingin tahu, ingin bertanya, ingin mempersoalkan, atau ingin mempermasalahkan). Pada sebagian orang NU, terutama anak-anak mudanya (PMII), saya melihat pemikiran yang *inquisitive* dan liberal, bahkan lebih liberal dari orang-orang Muhammadiyah. Dulu, kata James Peacock, *inquisitive mind* adalah kepribadian Muhammadiyah. Sekarang menurut saya, *inquisitive mind* hanya

kepribadian Amin Rais saja; yang lainnya tidak (Jalaluddin Rakhmat, 2005: 113).”

Demikian pula bahwa dalam NU, wacana liberalisasi, sebagai suatu konsep yang digunakan bagi gerakan pembaharuan Islam dewasa ini,¹ telah diakantonginya. Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila Mujamil Qomar memberi judul bukunya, yang merupakan hasil kajian atas penelitiannya terhadap NU dewasa ini, dengan “NU Liberal” (Mujamil Qomar: 2002). Tekait dengan ini, Azyumardi Azra mengungkapkan, bahwa memang dapat dibenarkan terdapat sejumlah pemikir NU yang cenderung berpikiran liberal dalam arti adaptif dalam merespon tantangan intelektual yang tidak lagi tradisional dalam konotasi

¹Hamid Zarkasyi mengungkapkan, sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini, bahwa gerakan pembaharuan Islam kini berlanjut menjadi liberalisasi Islam dalam wujud yang lebih terbuka dalam membela konsep-konsep westernisasi dan membongkar konsep-konsep dasar Islam. Lihat Adian Husaini, “37 Tahun Pembaharuan Islam di Indonesia”, *Republika*, 26 Januari 2007.

peyoratif (Azyumardi Azra, 2002: 19-20).

Pada era sekarang ini, tampaknya sebagian kalangan nahdiyyin yang dapat dikatakan memegang kuat *al-Kutub al-Sofro'* dalam istilah Amin Abdullah, atau sepadan dengan tradisi keilmuan Islam klasik dan tradisi keilmuan pesantren telah beranjak untuk tidak menganggap bahwa tradisi keilmuan yang selama ini mereka pegangi “sebagai produk jadi”, “produk instan”, “produk siap pakai”. Pada sebagian kalangan nahdiyyin ini, tampak telah merasa perlu untuk meninjau kembali secara kritis rumusan-rumusan yang telah ada sebelumnya (M. Amin Abdullah, 2004: 31), yang terdapat dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Dengan demikian, bukan “produk jadi” pemikiran Al-Ghazali dalam bidang teologi atau “produk jadi” pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam bidang fiqh yang diambil, misalnya, akan tetapi

yang diambil adalah sitem berpikir, pendekatan, atau metodologinya. Kalangan ini, telah dapat mendialogan literatur *al-Kutub al-Sofro'* dengan literatur *al-Kutub al-baidlo* (buku-buku putih) (M. Amin Abdullah, 2004: 44).

Di sisi lain, Muhammadiyah, sebagaimana diungkapkan Azra (Azyumardi Azra, 2000: 108), betul bahwa pada tingkat praktis merupakan organisasi modernis, namun betulkah dapat disamakan dalam tingkat idiologisnya. Dalam prakteknya, meskipun Muhammadiyah selalu mengklaim bahwa secara idiologis ia mengikuti gagasan tokoh-tokoh “modernis”, seperti al-Afghani, Abduh, dan Ridha, tetapi jika dilacak lebih jauh akar-akar idiologisnya terletak pada gagasan *tajdid* (pembaruan) Ibn Taimiyyah.

Dengan kerangka idiologi semacam itu, Muhammadiyah pada haekatnya ingin menerapkan Islam,

sebagaimana pernah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat utama Nabi (*ashab al-salaf*). Atas dasar ini, Muhammadiyah termasuk dalam golongan gerakan salafiyah, atau neosalafiyah. Dengan karakteristik ideologis tadi, salafisme yang menekankan pada sentralistik kemurnian doktrin *tawhid* (keesaan Tuhan), dengan kembali kepada Al-Qur'an dan hadits atau sering pula disebut sebagai gerakan purifikasi. Konsekuensi logis dari penekanan ini adalah penolakan terhadap bid'ah, khurafat, praktek-praktek lain yang dianggap menyimpang, dan inovasi-inovasi lain dalam ibadah, karena dipandang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadits (Azyumardi Azra, 2000: 108).

E. Kesimpulan

Dari uraian beberapa fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa kurang tepat apabila, dalam era

sekarang ini, dikotomi tradisional dan modern digunakan untuk menyebutkan dua organisasi terbesar di Indonesia ini, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dalam perjalanan dan kenyataannya, NU sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan bukanlah suatu organisasi yang bercirikan tradisional, yaitu terbelakang, serba statis, dan mandeg baik dalam hal pemikiran maupun praktek keagamaan dan organisasi. Sekarang ini di kalangan NU dapat dikatakan terbuka, berubah, dan bergerak sebagaimana ciri modern. Dalam beberapa hal kemodernan NU dapat dilihat, misalnya, dari segi rasa ingin tahu, ingin bertanya, ingin mempersoalkan, atau ingin mempermasalahkan kembali sesuatu yang sudah mapan, terutama dikalangan anak-anak muda NU, sehingga cepat dalam merespon permasalahan yang baru yang kemudian dicarikan landasan hukumnya. Oleh karena itu, kurang

tepat untuk era sekarang ini memberi penilaian bahwa NU adalah golongan konservatif, kolot, dan tidak mampu menghadapi perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian Husaini, "37 Tahun Pembaharuan Islam di Indonesia", *Republika*, 26 Januari 2007.
- Amin Abdullah. (2004). *Filsafat Kalam di Era Posmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (1995). "Religiositas Kebudayaan: Sumbangan Muhammadiyah dalam pembangunan Bangsa." Dalam *Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-43*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Amin Rais, "Tauhid Sosial: Doktrin Perjuangan Muhammadiyah", *Inovasi*, No. 1, Th. VII/1996.
- Arief Mudatsir. 1984. "Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal." *Prisma*, LP3ES.
- Azyumardi Azra. (1999). *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Bandung: Rosdakarya.
- Azyumardi Azra. (2002). "Liberalisasi Pemikiran NU". *Kata Pengantar dalam Mujamil Qomar. (2002). NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Deliar Noer. (1995). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Greg Fealy dan Greg Barton. (1997). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara*. (Yogyakarta: LKiS).
- Husein Muhammad. 2004. "Kitab Mu'tabar dan Ghayr Mu'tabar Versus Arus Liberatif Generasi Baru NU". *Afkar*, Edisi No. 17.
- Jainuri, A.. (1990). *Muhammadiyah; Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad Keduapuluh*. (Surabaya:Bina Ilmu).
- Jalaluddin Rakhmat, (2005), *Rekayasa Sosial; Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?*, Bandung: Rosdakarya.
- Kajian Santri,
<http://www.pesantrenonline.com/KajianSantri/detailKajian.php3?detail=28&pesantren=2>
- Martin van Bruinessen. "Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khittah 26: Pergulatan NU Dekade 90-an. Dalam Ellyyasa KH. Dharwis (ed.). *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- Mitsuo Nakamura. "Tradisionalisme Radikal; Catatan Mukhtamar Semarang 1979." Dalam Greg Fealy dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdatul Ulama dan Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Mujamil Qomar. (2002). *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Nurcholish Majid, "NU antara Tradisi dan Relevansi Pemikiran", dalam *Kata Pengantar Zuhairi Misrawi (ed.), (2004), Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Kompas.

Nur Syam, 2005, *Islam Pesisir*,
Yogyakarta: LKiS.

Said Aqil Siradj. "NU, Tradisi dan
Kebebasan Pikir." *Kompas*: Rabu,
29 Oktober 2003.

Shonhaji Sholeh. 2004. *Arus Baru NU*.
Surabaya: JP Books.

Very Verdiansyah. "Tradisionalisme
dan Liberalisme NU." *Kompas*.
Minggu, 28 November 2004.

Zamakhsyari Dhofier. 1994. *Tradisi
Pesantren; Studi tentang
Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta:
LP3ES.